



PEREMPUAN DAN PARTAI POLITIK: PROBLEMATIKA REKRUTMEN KADER PEREMPUAN PADA PARTAI AMANAT NASIONAL DI PROVINSI JAMBI

Cholillah Suci Pratiwi¹⁾; Dimasrizal²⁾; Wahyu Rohayati³⁾; Dori Efendi⁴⁾; Khairunnisa⁵⁾

¹⁾ cholillahsucipratiwi@unja.ac.id, Universitas jambi

²⁾ dimasrizal@unja.ac.id, Universitas Jambi

³⁾ wahyurohayati@unja.ac.id, Universitas Jambi

⁴⁾ doriefendi@yahoo.com, Universitas Jambi

⁵⁾ khairunnisaaa0501@gmail.com, Universitas Jambi

Abstract

This research aims to reveal the problems and strategies for recruiting female cadres in the National Mandate Party in Jambi Province. Even though there is an affirmative policy that requires political parties to include a minimum of 30% female representation, this study found a gap between women's representation in party management and in parliament. Through a qualitative approach, this research analyzed data obtained from in-depth interviews with party administrators, female cadres, and political observer. The results of the research show that the National Mandate Party in Jambi Province has made efforts to fulfill the quota for women's representation in management. However, a number of obstacles are still faced in increasing women's participation in legislative elections. Factors such as the dominance of existing political networks, party preferences for candidates who have financial resources, and public perception of the role of women in politics are some of the main challenges. This research highlights the importance of more inclusive and sustainable recruitment strategies to increase women's representation in parliament. In addition, efforts are needed to change society's perception of the role of women in politics and strengthen women's leadership capacity. The findings of this research provide an important contribution to a deeper understanding of the challenges and opportunities in increasing women's representation in political parties in Indonesia.

Keywords: Gender, Indonesian politics, Political parties, Political recruitment, Women's representation

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap problematika dan strategi rekrutmen kader perempuan di Partai Amanat Nasional di Provinsi Jambi. Meskipun terdapat kebijakan afirmatif yang mengharuskan partai politik menyertakan minimal 30% keterwakilan perempuan, studi ini menemukan adanya kesenjangan antara keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai dan di parlemen. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis data yang diperoleh dari wawancara mendalam dengan pengurus partai, kader perempuan, dan pengamat politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partai Amanat Nasional di Provinsi Jambi telah melakukan upaya untuk memenuhi kuota keterwakilan perempuan dalam kepengurusan. Namun, sejumlah kendala masih dihadapi dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam pemilihan legislatif. Faktor-faktor seperti dominasi jaringan politik yang sudah ada, preferensi partai terhadap calon yang memiliki sumber daya finansial, dan persepsi masyarakat terhadap peran perempuan dalam politik menjadi beberapa tantangan utama. Penelitian ini menyoroti pentingnya strategi rekrutmen yang lebih inklusif dan berkelanjutan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. Selain itu, diperlukan upaya untuk mengubah persepsi masyarakat tentang peran perempuan dalam politik serta memperkuat kapasitas kepemimpinan perempuan. Temuan penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan dan peluang dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam partai politik di Indonesia.

Kata Kunci: Gender, Keterwakilan perempuan, Partai politik, Politik Indonesia, Rekrutmen politik

PENDAHULUAN

Representasi perempuan dalam politik ternyata sangat penting, namun seringkali kepentingan ini tidak dibarengi dengan jumlah keterwakilan perempuan itu sendiri baik dalam jabatan politik maupun institusi. Perempuan yang tergabung pada lapangan pekerjaan di tingkat pusat, baik dalam parlemen atau lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif selalu menduduki bagian kecil atau minoritas, dan terkadang dalam suatu lembaga tersebut bahkan tak terdapat sama sekali keberadaan perempuan di posisi tersebut. Partai politik yang dianggap menjadi bagian terdepan dari tindakan kebijakan keterwakilan perempuan atau yang disebut sebagai *affirmative action* dianggap belum bisa dan mampu berjuang kuat untuk melibatkan perempuan



menjadi salah satu bagian pengelola yang strategis dan bisa memberikan keuntungan bagi mereka.

Peran perempuan dalam politik menjadi isu sentral yang perlu diteliti lebih mendalam. Partisipasi perempuan dalam politik seharusnya menjadi prioritas partai politik untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan (Mukarom, 2020). Selain itu, penelitian ini juga akan mengungkap apakah masuknya perempuan ke dunia politik telah memperluas cakupan isu yang dibahas, seperti kesejahteraan anak dan perlindungan perempuan. Meskipun ada regulasi yang mendukung partisipasi perempuan, implementasinya di lapangan masih menjadi tantangan.

Ronald Inglehart dan Pippa Norris (Siti Zaetun & Mar'iyah, 2020), menyebutkan ada tiga kendala yang menghambat perempuan untuk berpartisipasi dalam politik: (1) tantangan struktural, (2) tantangan dan hambatan organisasi, dan (3) hambatan tantangan tentang budaya. Hambatan struktural berhubungan dengan faktor-faktor seperti: pekerjaan, pendidikan dan status sosial ekonomi bagi perempuan. Hambatan sekolah seperti sistem politik, tingkat demokrasi dan sistem pemilu. dan hambatan budaya terkait dengan norma politik, serta bagaimana pandangan masyarakat tentang kesetaraan gender (Tirka Widanti, 2023).

Bahkan di lembaga partai politik, hal ini ditegakkan dengan mewajibkan partai politik untuk menyertakan 30% keterwakilan perempuan dalam pendirian dan kepemimpinan mereka di tingkat pusat. (Simbolon et al., 2023). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang mengatur tentang syarat-syarat pendirian partai politik, pada ayat 2 menyatakan: "Pendirian dan pembentukan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempunyai wakil perempuan sebanyak 30%.

Strategi rekrutmen yang tepat oleh partai politik sangat penting untuk meningkatkan jumlah perempuan dalam kepemimpinan dan mendorong partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Selain meningkatkan jumlah perempuan dalam politik, penting juga untuk memastikan bahwa partisipasi perempuan berkualitas. Strategi rekrutmen yang tepat akan membantu partai politik memilih calon perempuan yang kompeten dan berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan perempuan. Selain itu, kesadaran masyarakat juga harus ditingkatkan mengenai kekuatan dan kemampuan perempuan dalam memimpin partai politik. Dan rasa malu wanita itu berubah menjadi hal yang baik.

Terdapat beberapa penelitian yang mendukung penelitian ini, penelitian pertama dari (Yamin et al., 2021), Penelitian ini menjelaskan peran Partai Gerindra dalam mempromosikan keterwakilan perempuan di politik Indonesia, khususnya di tingkat kepengurusan DPC Partai Gerindra Jakarta Utara. Penelitian ini menyoroti kepatuhan partai terhadap ketentuan hukum yang mengharuskan minimal 30% keterwakilan perempuan dalam struktur kepengurusan. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi kebijakan afirmatif yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik.

Penelitian kedua dari (Priandi & Roisah, 2019), Jurnal ini menjelaskan tentang pentingnya keterlibatan perempuan dalam politik di Indonesia, dengan fokus pada tantangan dan strategi untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik. Dari perspektif feminisme radikal, tulisan ini menyoroti transformasi peran perempuan dari ranah domestik ke publik, serta tantangan yang dihadapi, seperti nilai sosial budaya yang mengutamakan laki-laki dan kurangnya dukungan politik. Beberapa langkah yang diusulkan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik meliputi; Pendidikan Politik, Mempersiapkan anak perempuan untuk mengenal politik melalui kurikulum pendidikan. Pemberdayaan Perempuan, Mendorong perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, termasuk menjadi calon legislatif. Kebijakan Hukum, Mengacu pada undang-undang yang mendukung keterwakilan perempuan, seperti alokasi 30% untuk calon legislatif. Kombinasi Modal Sosial dan Ekonomi, Partai politik perlu menggabungkan dukungan sosial



dan ekonomi untuk meningkatkan peluang perempuan. Kesimpulannya, meskipun ada tantangan, terdapat peluang besar bagi perempuan untuk berkiprah dalam politik, dan perlu ada gerakan untuk mendorong kebijakan yang sensitif gender.

Penelitian ketiga dari (Nimrah dan Sakaria et al., 2015), Jurnal ini menjelaskan tentang tantangan yang dihadapi perempuan dalam politik di Indonesia, terutama dalam konteks pemilu legislatif 2014. Meskipun terdapat undang-undang yang mendukung keterwakilan perempuan, partisipasi mereka dalam politik formal masih rendah. Beberapa faktor penyebab kegagalan caleg perempuan diidentifikasi, termasuk: Budaya patriarki, Masyarakat masih memandang politik sebagai domain laki-laki, sehingga perempuan sering dianggap sebagai pilihan kedua. Proses seleksi dalam partai politik, Proses ini tidak mendukung keterwakilan perempuan. Pengaruh media, Media sering kali tidak memberikan dukungan yang cukup untuk perempuan dalam politik. Kurangnya jaringan, Terdapat kekurangan jaringan antara organisasi massa dan partai politik yang mendukung perempuan.

Keterwakilan perempuan di DPR pusat hanya sekitar 9% dan di tingkat daerah sekitar 3%. Penurunan angka keterwakilan perempuan dari 18,2% pada 2009 menjadi 17,3% pada 2014 menunjukkan perlunya langkah strategis untuk meningkatkan dukungan dan representasi perempuan dalam politik. Jurnal ini juga merekomendasikan agar pemerintah membuat regulasi yang mendukung 30% representasi perempuan dan mendorong perempuan untuk aktif dalam partai politik serta meningkatkan kapasitas dan kompetensi mereka.

Penjelasan di atas menunjukkan betapa besarnya peran perempuan dalam politik, dan perlu adanya tuntutan lebih, karena dalam bekerja perempuan masih belum berpartisipasi dalam bidang pengelolaan strategi politik. Meski jumlah pemimpin perempuan di partai politik semakin meningkat, namun partisipasi perempuan di parlemen harus terus ditingkatkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap tantangan spesifik yang dihadapi oleh Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Jambi dalam merekrut perempuan sebagai pemimpin dan menganalisis strategi yang telah mereka terapkan. Dengan memahami hal ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai upaya partai politik dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan (Artina, 2016).

Berdasarkan topik-topik di atas, diharapkan penelitian ini bermanfaat dalam menambah pengetahuan untuk memahami pendapat atau pandangan mengenai masalah rekrutmen kader perempuan dan strategi partai politik dalam upaya menarik kader perempuan di Provinsi Jambi. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam memberikan bantuan ilmiah atau wawasan baru tentang kesetaraan gender pada partai politik serta memahami hubungan antara teori dan fakta. Diharapkan juga dapat memberikan upaya penelitian untuk mengembangkan dan menambah sumber daya bagi mahasiswa. Selain itu juga diharapkan dapat memberikan dampak yang bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman bagi praktisi terhadap permasalahan dan strategi terkait pengelolaan kader perempuan bagi mereka yang terjun di dunia politik. Selain itu dapat menambah informasi baru bagi semua orang yang membaca artikel ini dan juga untuk menambah pemahaman pengetahuan politik para anggota kader baru perempuan.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep partai politik

Menurut Jimly Asshiddiqie (Asshiddiqie., 2006), partai politik adalah perkumpulan sekelompok masyarakat sosial dalam organisasi publik yang tidak terikat pada organisasi politik. Saat ini, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa partai politik adalah organisasi nasional yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia berdasarkan kemauan dan niat untuk memperjuangkan dan melindungi kepentingan



politik anggotanya, masyarakat, bangsa dan pemerintahan, serta mendukung keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Konsep partai politik yang dikemukakan Souraf mempunyai beberapa bagian. Pengembangan organisasi dan pencapaian tujuan melalui pemilihan parlemen. Organisasinya luas dan mencakup banyak kelompok dalam masyarakat. Fokus utama dalam politik adalah mencapai tujuan partai. Menunjukkan konsistensi, stabilitas dan bekerja sebagai satu kesatuan dalam pengambilan keputusan dan loyalitas anggota (Hardjaloka, 2012).

Rekrutmen partai politik

Politisasi atau kerap disapa rekrutmen merupakan salah satu cara partai politik mencari anggota baru dan mengundang individu-individu berbakat untuk bergabung dalam politik. Selain itu, dapat dikatakan bahwa politik adalah suatu cara untuk memilih warga negara sebagai pemimpin. Partai politik hendaknya berpedoman pada sejumlah prinsip dalam proses seleksi, setidaknya ada delapan prinsip yang dijadikan acuan bagi partai politik. yaitu; Anti-korupsi, transparansi, akuntabilitas, prestasi politik, demokrasi, privatisasi/kemerdekaan, keuangan. dan orang-orang (Fitriyah, 2020).

Proses Rekrutmen Partai Politik

partai politik memiliki kelembagaan yang kaderisasinya kua yang dimana partai politik kuat ini mampu menempatkan wakilnya di kursi DPRD secara dominan di semua daerah pemilihan. Hal ini akan memperkuat partai dengan menempatkan pejabat tinggi di kursi DPRD sehingga partai dapat menonjol dan mencalonkan calon presiden daerahnya sendiri. Hal ini meningkatkan status kelompok partai politik tersebut dan memotivasi dari kelompok partai politik lainnya. (Fitriyah, 2020). Sehingga pada akhirnya akan didapatkan popularitas yang tinggi yang dapat meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat dan memberikan kekuatan pada elaktibilatas partai politik tersebut. Dengan itu maka partai politik tersebut membutuhkan perekrutan kader-kader politik laki-laki maupun perempuan.

Memperkuat Fungsi Rekrutmen Partai Politik

Jika kita ulas sekilas, cara menggaet partai politik belum dilakukan secara terbuka, transparan, dan demokratis, sehingga pemilihan pemimpin gagal. Pengorganisasian kader juga tampaknya tidak sistematis dan tidak efisien. (Kodiyat MS, 2019). Seringkali partai politik mulai membina para kadernya ketika pemilu akan di adakan atau ada event-event politik penting yang disoroti oleh media maupun seperti, kongres partai dan sidang majelis permusyawaratan rakyat.

Secara umum pola rekrutmen paertai bertujuan untuk memperoleh partisipasi suara terbanyak dalam pemilihan umum, tanpa melihat kualifikasi orang yang dicalonkan sebagai anggota legislatif. Banyak calon sah muncul lebih awal. Yang paling kentara adalah banyak artis yang bergabung dengan partai politik dan menjadi calon sah di DPR. Selain pola tarik menarik seniman, pola lainnya adalah pengembangan sistem kepemimpinan politik. Padahal, orang-orang yang mengajukan diri sebagai calon sah adalah kerabat dekat petinggi partai politik seperti pasangan, anak, adik laki-laki, ipar perempuan, bahkan ipar laki-laki.

Melihat permasalahan di atas, maka langkah awal yang harus diambil oleh partai politik adalah berusaha menjadikan anggota terpilih dari hasil pemilu sebagai orang-orang yang mewakili kepentingan rakyat dan bebas korupsi. Memperkuat proses menarik partai politik untuk mendapatkan orang-orang yang tepat dan penuh semangat yang dicalonkan oleh partai politik, yang lebih sesuai dengan kebutuhan bangsa daripada kebutuhan individu, partai, dan partai politik.



METODE

Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memahami secara mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan partai politik dalam merekrut pekerja perempuan, serta persepsi para pekerja perempuan terhadap lingkungan kerja di partai politik.

Penelitian ini berfokus pada Partai Amanat Nasional (PAN), salah satu partai politik terbesar di Provinsi Jambi yang secara konsisten meraih kursi terbanyak dalam dua pemilu terakhir. Karena keberhasilannya ini, PAN dianggap memiliki strategi rekrutmen yang efektif. Untuk memahami lebih dalam strategi ini, penelitian dilakukan di kantor pusat PAN Provinsi Jambi. Dengan berbagai narasumber, termasuk pimpinan partai, analis politik lokal, dan kader perempuan PAN, baik yang berhasil maupun yang belum berhasil dalam pemilihan. Wawancara yang dilakukan bersifat informal dan tidak terstruktur, artinya peneliti tidak menggunakan pertanyaan yang sudah disiapkan secara kaku. Tujuannya agar narasumber merasa lebih bebas dan jujur dalam menyampaikan informasi, terutama mengenai hal-hal yang bersifat sensitif atau rahasia.

Penulisan metode pengumpulan data pada artikel ini, berbeda dengan metode pada artikel lainnya, terdapat pengecualian dan contoh. Namun cara ini menggunakan tipe yang berbeda-beda. Menurut Sugiono, dokumentasi merupakan catatan peristiwa masa lalu yang dapat ditulis atau dibuat berdasarkan sejarah seseorang. Metode pengumpulan data dokumen ini diperlukan untuk menyempurnakan data penelitian yang diperoleh dari metode wawancara dan observasi. Data dokumen seperti buku, majalah, surat kabar, media, benda, foto atau artikel digunakan sebagai data penelitian. Pencatatan data penelitian akan sangat luas. Pada bagian selanjutnya penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan sekumpulan informasi terstruktur yang dapat ditentukan dan ditindaklanjuti dalam bentuk teks. Bagian terakhir penting untuk menemukan makna dari setiap sinyal yang diterima dari lapangan. Metode ini akan menampilkan model penjelasan dan alur kasus dari penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASA

Beberapa tahun belakangan proses demokrasi di Indonesia dari sejak tahun 1997- 2019 dapat terlihat bahwa keterwakilan perempuan di dalam dunia politik belum mampu untuk memenuhi kuota yang telah disediakan. Berikut data yang dapat menggambarkan keadaan tersebut:

Tabel 1. Keterwakilan Perempuan di DPR RI

Tahun	Keterwakilan Perempuan
1997	9,7 %
1992	8,4 %
2004	11,5 %
2009	18,2 %
2014	17,3 %
2019	22 %

Sumber: Sapiah S., Mursalin, A., & Armansyah, 2020.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 1999 persentase jumlah perempuan hanya sebesar 9 % dan bisa dikatakan hanya sejumlah 46 anggota dari 500 umlah kursi yang disediakan untuk DPR RI. Pada pemilu berikutnya tahun 2004, jumlah anggota hanya mencapai 11,5% saja sekitar 63 kursi dari 550 kursi orang untuk jumlah kursi legislatif. Semakin meningkat sebesar 18% di tahun 2009 dan kembali menurun di tahun 2014 sebanyak 22 kursi jika dihitung dari jumlah kursi yang diterima pada tahun 2009 yaitu sebanyak 101 kursi. Dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 mencapai 22% (Rivki et al., 2022). Akan



tetapi belum mencukupi sampai 30% dari yang telah ditetapkan untuk perempuan dalam parlemen. dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Data Anggota DPRD Provinsi Jambi

Periode	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
2004-2009	39	6	45
2009-2014	35	10	45
2014-2019	48	7	55
2019-2024	47	8	55

Pada tabel diatas dapat menjelaskan bahwa data perempuan yang menjadi anggota DPRD Provinsi Jambi menunjukkan ketimpangan terhadap anggota laki laki yang menjadi anggota dalam DPRD Provinsi Jambi. Pada tahun 2004-2009 jumlah anggota laki-laki dengan perempuan mencapai 1:6, pada tahun 2009-2014 mencapai 1:4 dan pada tahun 2014-2019 mencapai 1:7 dan pada tahun 2019-2024 terbaru mncapai 1:6 dalam jumlah kursi anggota DPRD Provinsi Jambi.

Adapun rincian jumlah kursi yang dipegang masing-masing partai sejak periode pasca reformasi 2004 hingga 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik Di DPRD Provinsi Jambi

Partai politik	Jumlah Kursi Dalam Periode			
	2004-2009	2009-2014	2014-2019	2019-2024
PNIM	1	0		
PKPB	4	0		
PBR	2	1		
PBB	0	1	1	0
PPP	4	3	4	3
PKS	3	3	3	5
PKB	4	2	6	5
PAN	8	8	5	7
DEMOKRAT	2	8	9	7
PDI-P	6	5	7	9
GOLKAR	11	7	8	7
HANURA		Baru (5)	3	2
GERINDRA		Baru (2)	6	7
NASDEM			Baru (3)	2
BERKARYA				Baru (1)
Jumlah Anggota	45	45	55	55
Jumlah Partai	10	11	11	11

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa perolehan kursi pada partai PAN memiliki keseimbangan di tahun 2004 sampai 2014 namu pada tahun 2019 mengalami penurunan 3 kursi dan naik lagi 2 kursi untuk tahun 2024. Hal ini menunjukkan baha perbandingan kader perempuan dan laki-laki setiap partai hanya mampu menambah 2 kursi saja dan dominan kursi yang dimenangkan oleh kader laku-laki. Berikut jumlah perbandingan kursi kader nya:

Tabel 4 Perbandingan Kader Lak-Laki Dengan Kader Berdasarkan Partai Politik Di Dprd Provinsi Jambi.

PARTAI POLITIK	PERIODE PEMILU			
	2014-2019		2019-2024	
	L	P	L	P



PBB	1	-	-	-
PPP	4	-	3	-
PKS	3	-	5	-
PKB	5	1	4	1
PAN	4	1	6	1
DEMOKRAT	6	3	4	3
PDI-P	7	-	8	1
GOLKAR	7	1	6	1
HANURA	3	-	2	-
GERINDRA	6	-	7	-
NASDEM	2	1	1	1
BERKARYA	-	-	1	-
JUMLAH	48	7	47	8

Untuk informasi mengenai kader perempuan yang menduduki kursi DPRD di Provinsi Jambi pada periode 2019-2024 sebagai berikut:

Tabel 5. Anggota Perempuan di DPRD Provinsi Jambi Periode Pemilu 2019

No	Nama	Dapil	Partai	Jabatan
1	Ririn Novianty, S.E.	Jambi II -Kab. BatanghariMuaro Jambi	PAN	Sekretaris Komisi IV
2	Nur Tri Kadarini, S.E., M.Si., Ak.	Jambi II - Kab.BatanghariKab.Muaro Jambi	PDI-P	Anggota Komisi IV
3	Dra.Hj.Maimaznah	Jambi I - Kota Jambi	Golkar	Anggota Komisi IV
4	Hj.Yuli Yuliarti, S.E., M.M.	Jambi I - Kota Jambi	Demokrat	Anggota Komisi I
5	Ezzaty, S.Psi.	Jambi IV-Kab Kerinci - Kab Sungai Penuh	Demokrat	Anggota Komisi I
6	Hj. Nurhayati	Jambi VI-Kab Tanjab Bar-Tanjab Tim	Demokrat	Wakil Ketua Komisi IV
7	Hj. Eka Marlia, S.E., M.H.	Jambi V-Kab Bungo-Kab Tebo	PKB	Anggota Komisi III
8	Hj. Rahima, S.H.	Jambi V-Kab Bungo-Kab Tebo	Nasdem	Anggota Komisi IV

Data menunjukkan bahwa faktor kekerabatan dengan elite politik menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan calon perempuan dalam pemilihan anggota DPRD Provinsi Jambi. Hal ini mengindikasikan adanya struktur kekuasaan yang patriarkal dan oligarkis dalam sistem politik daerah. Analisis data menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Jambi masih jauh dari target yang ditetapkan. Hanya sekitar setengah dari target yang berhasil tercapai. Fenomena menarik lainnya adalah banyaknya calon perempuan yang memiliki kedekatan dengan keluarga pejabat daerah. Contohnya, Bu Hajj. Rahima, S.H. dan Ria Mayang Sari, S.H., M.H. yang merupakan keluarga mantan Gubernur Jambi, serta Ezzati, S.Pesi, putra Wali Kota Sungai Penuh.

Analisis data mengungkapkan adanya ketimpangan antara jumlah perempuan di posisi kepemimpinan partai politik dengan jumlah perempuan yang duduk sebagai anggota DPRD. Meskipun secara internal partai politik telah mencapai target kuota perempuan, namun dalam konteks representasi politik di tingkat legislatif, target tersebut belum tercapai (Lawless, 2009).



Temuan ini menunjukkan bahwa masih ada gap antara kebijakan afirmatif partai politik dengan realitas politik yang lebih luas. Meskipun partai politik telah berupaya meningkatkan partisipasi perempuan dalam kepemimpinan, namun mekanisme politik yang lebih luas, seperti sistem pemilihan dan budaya politik yang masih patriarkal, menjadi faktor penghambat bagi peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen."

Untuk mencapai representasi perempuan yang bermakna dalam politik, partai politik harus memiliki strategi rekrutmen yang komprehensif (Matland & Studlar, 1996). Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang inklusif bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif, serta mengubah budaya politik yang seringkali masih mendiskriminasi perempuan. Dengan begitu, perempuan tidak hanya menjadi bagian dari partai politik, tetapi juga berperan sebagai pengambil keputusan yang mampu menyuarakan kepentingan mereka.

Penelitian ini menarik karena akan menggali lebih dalam mengenai tantangan dan peluang bagi perempuan untuk berkarir di dunia politik, khususnya di PAN. Dengan menganalisis strategi yang telah dilakukan, kita dapat belajar dari praktik terbaik dan merancang intervensi yang lebih efektif.

PENUTUP

Simpulan

Kesimpulan dari Penelitian mengenai rekrutmen kader perempuan di Partai Amanat Nasional (PAN) di Provinsi Jambi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara mandat kuota keterwakilan perempuan sebesar 30% dengan jumlah sebenarnya perempuan yang menduduki posisi terpilih. Meskipun partai berupaya memenuhi kuota di tingkat administratif, Namun masih terdapat beberapa tantangan yang menghambat peningkatan partisipasi perempuan dalam pemilu legislatif. yang pertama Dominasi jaringan politik yang ada, Koneksi politik yang sudah mapan seringkali memprioritaskan kandidat laki-laki daripada kandidat perempuan, kedua Kendala finansial, Pilihan partai terhadap kandidat yang memiliki sumber daya finansial membatasi peluang bagi perempuan. ketiga Persepsi masyarakat, Peran gender tradisional dan sikap masyarakat terhadap perempuan dalam politik terus menimbulkan hambatan. Meskipun PAN telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan keterwakilan perempuan, strategi rekrutmen yang lebih inklusif dan berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi tantangan-tantangan ini secara efektif.

Saran

Saran yang bisa peneliti berikan pada penelitian ini adalah pemerintah perlu Menerapkan kuota yang lebih ketat bagi perempuan dalam seleksi kandidat dan Kembangkan program khusus untuk mendukung kandidat perempuan, seperti pelatihan kepemimpinan dan pendampingan untuk Mengatasi Persepsi Masyarakat. Mempromosikan proses yang transparan dan demokratis di dalam partai untuk memastikan kesempatan yang sama bagi semua anggota agar Mendorong pengambilan keputusan dari bawah ke atas untuk memberikan lebih banyak suara kepada anggota perempuan. terakhir Mendirikan dana untuk mendukung kampanye kandidat perempuan, khususnya mereka yang berasal dari latar belakang kurang mampu untuk di Jajaki kemitraan dengan LSM dan donor dana untuk mendapatkan pendanaan tambahan serta Memperkuat Jaringan perempuan dalam parlemen.

DAFTAR PUSTAKA

- Artina, D. (2016). Keterwakilan Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(1), 123-141. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss1.art7>
- Asshiddiqie., J. (2006). parpol dan pemilu sebagai instrumen demokrasi. *J Urnal*, 3 nomor 4(MK), 163.



- http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/BOOK_Volume3nomor4Desember2006.pdf#page=164
- Fitriyah, F. (2020). Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 11(1), 1–17. <https://doi.org/10.14710/politika.11.1.2020.1-17>
- Hardjaloka, L. (2012). Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif. *Jurnal Konstitusi*, 9(2), 404–430.
- Kodiyat MS, B. A. (2019). Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kota Medan. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.30596/edutech.v5i1.2756>
- Lawless, J. L. (2009). Sexism and Gender Bias in Election 2008: A More Complex Path for Women in Politics. *Politics and Gender*, 5(1), 70–80. <https://doi.org/10.1017/S1743923X09000051>
- Matland, R. E., & Studlar, D. T. (1996). The contagion of women candidates in single-member district and proportional representation electoral systems: Canada and Norway. *Journal of Politics*, 58(3), 707–733. <https://doi.org/10.2307/2960439>
- Mukarom, Z. (2020). Problem Serius Keterwakilan Perempuan dalam Politik”. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(3), 259.
- Nimrah dan Sakaria, S., Kunci, K., & Budaya Patriarki, dan. (2015). Perempuan Dan Budaya Patriarki Dalam Politik (Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014). *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 1(2), 2407–9138.
- Priandi, R., & Roisah, K. (2019). Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 106. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.106-116>
- Rivki, M., Bachtiar, A. M., Informatika, T., Teknik, F., & Indonesia, U. K. (2022). *rekrutmen dan keterwakilan perempuan partai demokrat pada pemilihan umum legislatif Tahun 2019 DPRD Provinsi Jambi*. 112.
- Simbolon, N. A., Pakpahan, L. C., & ... (2023). Meningkatkan Partisipasi Perempuan Dalam Politik Untuk Memenuhi Affirmative Action Pada DPC PKB Kota Medan. *Jurnal Sains Dan ...*, 5(2), 669–674.
- Siti Zaetun, & Mar'iyah, C. (2020). Politik Keperwakilan Perempuan Dalam Rekrutmen Politik Partai Nasdem Pada Pemilu 2019. *TheJournalish: Social and Government*, 1(3), 119–129. <https://doi.org/10.55314/tsg.v1i3.58>
- Tirka Widanti, N. P. (2023). Gender Equality Issues and Women's Empowerment Policies From 2000 To 2022: a Bibliometric Analysis. *Public Policy and Administration*, 22(2), 227–240. <https://doi.org/10.13165/VPA-23-22-2-09>
- Yamin, U. Z., Idrus, I. A., & Koonah. (2021). Evaluasi Keterwakilan Perempuan di Partai Politik (Studi Kasus DPC Partai Gerindra Jakarta Utara). *Jurnal Of Government*, 6, 174–190.